

BAB I

POLITIK SEBAGAI SENI DAN ILMU

Pengantar

Dewasa ini semakin disadari oleh banyak kalangan bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan atau aktivitas manusia. Politik hadir di mana-mana di lingkungan sekitar. Sadar atau tidak mau atau tidak mau, politik ikut memengaruhi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Kondisi itu berlangsung sejak lahir hingga kematian manusia, tidak peduli apakah manusia itu ikut memengaruhi proses politik atau tidak, yang jelas politik memengaruhi semua orang. Aristoteles pernah mengatakan bahwa: 'politik adalah *Magister of Science*' maksudnya bukan dalam perspektif ilmu pengetahuan (*scientific*) tetapi ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi penting, sebab politik memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupannya. Politik berarti mengatur tentang yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak semestinya kita lakukan. Inilah yang memperjelas pentingnya mempelajari politik.

Ilmu politik merupakan bagian dari usaha manusia yang berkesinambungan untuk memahami dirinya, menumbuhkan sikap toleransi dari keanekaragaman, tidak terburu-buru menilai masalah yang belum diketahui, dan dapat memahami 'panggung belakang' dari fenomena kehidupan. Bagian ini akan menguraikan tentang konsep ilmu politik dan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam ilmu politik. Pembahasan bagian awal akan menjelaskan konsep-konsep politik sekaligus menguraikan tentang pendekatan-pendekatan dalam memahami ilmu politik. Melalui uraian itu, para pembaca dapat menyusun satu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ilmu politik.

Uraian selanjutnya yakni berusaha menjelaskan inventarisasi kajian yang perlu mendapat perhatian dalam kajian ilmu politik. Melalui pembahasan tersebut mahasiswa dapat menjawab masalah dimaksud yang pada akhirnya dapat memberi gambaran yang tepat mengenai politik.

Pada pembahasan awal bersifat pengantar untuk memasuki ilmu politik yang sudah sejak lama berkembang mulai dari zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Melalui pembahasan tersebut, maka para pembaca dapat menjadi dasar atau basis suatu disiplin ilmu pengetahuan. Karena itu urutan pembahasan yakni akan membicarakan hakikat ilmu, pengertian ilmu politik, apakah ilmu politik dapat dikategorikan sebagai ilmu atau tidak, politik sebagai seni, hakikat ilmu politik, sasaran ilmu politik dan contoh kajian/perhatian ilmu politik. Pada bagian akhir pembahasan soal latihan untuk pendalaman materi.

Hakikat Ilmu

Pengertian ilmu dapat ditunjukkan pada kata *ilm* (Arab), *science* (Inggris), *watenschap* (Belanda), dan *wissenshaf* (Jerman) (Syafie, 2000). Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu berasal dari bahasa Arab. Kata itu mengacu pada suatu kemampuan yang terdiri dari wawasan dan pengetahuan.

Pada zaman dahulu, orang yang dikatakan berilmu jika dianggap memiliki kemampuan yang didapat melalui syarat-syarat tertentu. Orang yang dianggap berilmu merupakan orang yang lolos ujian dan syarat-syarat, dan syarat tersebut menunjukkan 'predikat' yang layak dimilikinya.

Ilmu pengetahuan berarti suatu ilmu yang didapat dengan cara mengetahui, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sekedar tahu. Kata ilmu juga dapat dikaitkan dengan kata sifat ilmiah yang artinya berdasarkan kaidah keilmuan, yang terdiri dari syarat-syarat. Harre (dalam Gie, 1991) mendefinisikan ilmu sebagai *a collection of well attested theories which explain the pattern regularities among carefully studied phenomena* (kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola yang teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati).

Sementara itu, The Liang Gie (1991) mengemukakan ilmu sebagai proses, prosedur, maupun sebagai produk atau hasil. Sebagai proses ilmu merupakan proses yang terdiri dari kegiatan mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan kesimpulan. Ilmu sebagai aktivitas yakni yang rasional, kognitif dan teknologis. Sebagai prosedur yakni ilmu berkaitan dengan penggunaan cara yang ketat digunakan agar proses mencari ilmu dapat berjalan dengan baik. Untuk menghasilkan yang benar, diperlukan metode atau prosedur yang benar pula.

Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia (Peursen, 2008). Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu (Sumantri, 1987). Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.
2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani "Metodos" yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.
3. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab-akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga.
4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga

bersudut 180°. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.

Kelahiran suatu ilmu, berasal dari pengetahuan manusia. Koleksi pengetahuan manusia cukup banyak. Pengetahuan tersebut akan berpotensi menjadi ilmu, ketika disusun berdasarkan persyaratan seperti yang telah dikemukakan oleh Sumantri di atas. Pengetahuan yang disepakati sehingga menjadi suatu 'ilmu', apabila dapat diuji dengan enam komponen seperti problem, sikap, metode, aktivitas, konklusi, dan efek. Istilah diuji dalam ranah ilmu berarti mampu dibuktikan baik secara empiris di lapangan maupun dari sisi teks-teks.

Akhirnya ilmu dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode dan tata langkah secara teratur, sistematis, objektif, dan universal. Aneka prosedur di atas yakni untuk menghasilkan kumpulan pengetahuan mengenai gejala-gejala alam, kemasyarakatan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, memberikan penjelasan atau melakukan penerapan.

Hakikat Politik

Apakah politik itu? Dari berbagai kepustakaan politik, disimpulkan bahwa paling tidak ada 3 cara yang sering dipergunakan untuk menjelaskan pengertian politik, yakni; *pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori tentang aktivitas yang membentuk politik seperti; konflik dan partisipasi, menurut Paul Coon konflik merupakan esensi politik. *Kedua*, menyusun satu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik. *Ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik, dari sinilah diharapkan dapat memberi jawaban dengan gambaran yang tepat mengenai politik.

Sejak awal hingga perkembangannya yang terakhir, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik, *Pertama*, politik ialah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan pembicaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik adalah kegiatan yang diarahkan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai

konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Pandangan yang pertama disebut juga pandangan 'klasik'. Sudut pandang ini melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan seluruh anggota masyarakat. Aristoteles membedakan unsur-unsur yang menyangkut kebaikan bersama dengan unsur-unsur yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Unsur-unsur yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada urusan-urusan individu atau yang menyangkut kepentingan umum.

Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia hidup dalam polis (negara). Hanya dalam negara itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena di sana urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, kemudian tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Di luar polis (negara) manusia dipandang sebagai makhluk yang berada di bawah manusia, seperti, binatang, atau sebagai manusia yang berderajat tinggi seperti dewa bahkan Tuhan. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum dan kebaikan bersama? Dapatkah dipandang sebagai suatu substansi kebaikan bersama? Siapakah yang harus menafsirkan suatu kaidah kepentingan umum atau tidak?

Rumusan kepentingan umum yang dikemukakan oleh para ahli cukup bervariasi, sebagian menyatakan bahwa kepentingan merupakan tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebijakan, kebahagiaan, dan kebenaran. Sebagian lagi merumuskan kepentingan umum sebagai kepentingan orang banyak sehingga membedakan *general will* (keinginan banyak orang/kepentingan umum), dan *will of all* (kumpulan keinginan orang banyak). Sementara itu ada yang merumuskan kepentingan umum sebagai keinginan golongan mayoritas. Ilmuwan politik kontemporer Samuel P. Huntington, melukiskan kepentingan umum secara singkat yaitu sebagai kepentingan pemerintah yang dibentuk untuk menyelenggarakan kebahagiaan bersama.

Konsep politik menurut pandangan klasik, tampak sangat kabur sehingga kita diperhadapkan pada kesukaran dalam menentukan patokan kepentingan umum yang disetujui bersama dalam masyarakat. Namun suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari pandangan klasik ini adalah penekanan yang diberikan pada apa yang seharusnya dicapai dalam kebaikan bersama seluruh warga negara dan dengan cara bagaimana sebaiknya atau

dengan cara apa sehingga tujuan itu dapat dicapai. Pandangan klasik lebih menekankan pada aspek filosofi (ide dan etik) daripada aspek politik. Dalam pengertian politik terkandung tujuan dan etik masyarakat yang jelas. Ialah membicarakan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar kepentingan bersama. Barangkali dalam aspek filosofis ini merupakan kelebihan sehingga menjadi ciri khas pandangan klasik, yang lebih menekankan pada aspek politisnya, oleh karena itu metode kajian yang digunakan bukan empirisme tetapi metode spekulatif normatif.

Konsep politik kedua ialah, penyelenggaraan negara dan pemerintahan, biasa juga disebut kelembagaan. Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Menurut Max Weber, negara dipandang sebagai suatu komunitas, monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah, karena itu politik memengaruhi pembagaian kekuasaan antarkelompok dalam satu negara, di samping itu negara merupakan suatu struktur organisasi atau administrasi yang konkret. Karenanya menurut dia negara semata-mata sebagai paksaan fisik yang digunakan memaksakan ketaatan.

Berdasarkan atas pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 aspek sebagai ciri negara, yaitu:

1. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti; jabatan, peranan lembaga-lembaga yang semuanya memiliki tugas yang jelas batasannya yang bersifat kompleks dan formal peranannya.
2. Kekuasaan untuk menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat putusan yang final dan mengikat seluruh warga negara. Para pejabat mempunyai hak untuk menegakkan putusan itu, seperti menjatuhkan hukuman dan menegakkan hak milik. Dalam hal ini, untuk melaksanakan kenegaraan, maka negara menggunakan aparatnya seperti: Polisi, militer, jaksa, hakim, dan petugas negara lainnya.
3. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tersebut.

Sebelum Perang Dunia II, sarjana ilmu politik cenderung untuk mengidentifikasi "politik" sebagai studi mengenai negara. Dalam banyak kepustakaan ilmu politik, negara menjadi wilayah kajian karena di dalamnya terdapat banyak pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali (Ebyhara, 2010). Hal itu disebabkan karena negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan karenanya merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Akan tetapi, dewasa ini para ilmuwan politik tidak hanya menggunakan konseptualisasi tersebut sebagai satu-satunya konsep yang dianggap dominan. Penyebabnya mereka berpendapat bahwa politik merupakan gejala serba hadir dalam masyarakat apa saja, yang tidak terbatas pada masyarakat negara atau negara modern. Para ilmuwan politik mencari dan merumuskan ilmu politik untuk menjelaskan berbagai fenomena. Ada 4 alasan sehingga para ilmuwan tidak lagi menggunakan negara sebagai pusat kajian.

1. Konsep negara yang dipergunakan hanya dapat menjelaskan ciri negara industri maju seperti di Eropa Barat, Amerika Utara. Dengan kata lain tidak dapat menjelaskan semua ciri-ciri negara khususnya pada negara terbelakang yang baru merdeka. Meskipun demikian, di dalam negara tersebut sudah melaksanakan proses atau kegiatan politik.
2. Dalam negara-negara industri maju, kekuasaan tidak terpusat pada negara melainkan terdistribusi kepada negara-negara bagian dan kepada berbagai kekuatan politik dalam masyarakat.
3. Konseptualisasi di atas terlalu menekankan sudut pandang yuridis formal terhadap negara, sehingga mereka dilihat sebagai gejala yang statis.
4. Yang melakukan kegiatan bukan lembaga-lembaga negara yang tidak memiliki nilai dan kepentingan tetapi elite yang memegang jabatan ternyata memiliki efek dan kepentingan sendiri-sendiri. Oleh karena itu perilaku elite yang menduduki jabatan pada lembaga tersebut, yang dipelajari bukan lembaga itu akan tetapi aspek lain yang ada.

Konsep ketiga adalah kekuasaan. Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat kedudukan dan penggunaan kekuasaan di mana pun kekuasaan itu ditemukan.

Robson merupakan salah seorang yang mengembangkan pandangan-pandangan tentang kekuasaan ini. Dirumuskan, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni: sifat, hakikat, dasar, proses-roses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan. Ulasan mendalam tentang kekuasaan akan dibahas pada topik lain di buku ini. Konsep politik dengan fokus sebagai perjuangan untuk mencari dan mempertahankan memiliki sejumlah kelemahan.

1. Konseptualisasi kekuasaan tidak membedakan yang tidak beraspek politik. Misalnya kemampuan para kiai atau pendeta untuk memengaruhi jamaah agar melaksanakan ajaran agama tidaklah beraspek politik. Hal itu karena tidak berkaitan dengan pemerintah selaku pemegang kewenangan yang mendistribusikan nilai-nilai, melainkan menyangkut lingkungan masyarakat yang lebih terbatas. Namun apabila konseptualisasi di atas diikuti, maka kemampuan para pemimpin agama untuk memengaruhi cara berpikir dan berperilaku anggota jamaah termasuk dalam kegiatan politik.
2. Fokus pembahasan politik hanya pada kekuasaan mengabaikan konsep yang hampir sama seperti kewenangan dan legitimasi.

Konsep yang keempat adalah “perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum”, atau disebut juga konsep “*fungionalisasi*”. Konsep ini memandang politik sebagai kaitan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Di antara ilmuwan politik yang menggunakan kacamata fungsional ini dalam mempelajari gejala politik ialah David Easton dan Horald Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai *the Authoritative allocation of value for a society* (politik adalah sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat). Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa setiap kegiatan yang memengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat.

Sementara itu, Lasswell menyimpulkan, proses politik sebagai masalah *who the get what, when, how* (siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana). Mendapatkan apa, artinya mendapatkan nilai-nilai. Kapan, berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai yang terbanyak. Bagaimana, berarti dengan apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

Pengertian nilai yakni sebagai hal-hal lain yang diinginkan, yang dikejar oleh manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai itu ada yang bersifat abstrak maupun prinsip-prinsip yang dianggap baik, seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan, nasionalisme, dan sebagainya. Di samping bersifat abstrak, adapula nilai-nilai yang bersifat konkret, seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana perhubungan, dan komunikasi dan rekreasi. Jadi nilai-nilai itu ada yang berupa kebutuhan ideal spiritual dan yang bersifat material jasmaniah. Nilai-nilai yang abstrak dan konkret itu dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum berarti

memengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat.

Kelemahan pandangan fungsionalitas ini ialah merupakan perintah sebagai saran dengan wasit terhadap persiapan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum. Fungsionalisme mengabaikan kenyataan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan sendiri, tidak berupa kepentingan yang melekat pada lembaga pemerintah (yang memiliki kepentingan umum) maupun kepentingan para elite (yang memegang jabatan).

Di samping itu fungsionalisme cenderung melihat nilai-nilai secara instrumental bukan sebagai tujuan seperti ditekankan pandangan klasik. Bagi fungsionalisme, nilai-nilai sebagai tujuan bersifat sangat relatif karena berbeda dari satu tempat dan waktu yang lain. Dalam hal ini dilupakan bahwa tidak pernah dapat bersifat netral, bahwa politik secara ideal seharusnya menyangkut kebaikan bersama.

Konsep kelima adalah konsep lain yang melihat kegiatan politik adalah "konflik", menurut pandangan ini, kegiatan untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya ini sering kali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak, dalam hal ini adalah di antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai itu disebut "konflik". Menurut pandangan ini, konflik politik pada dasarnya adalah konflik itu sendiri, sebab konflik adalah gejala yang serba kompleks dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik.

Akan tetapi konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat, bukan hanya konflik yang terjadi tetapi juga ada konsensus, kerja sama, dan integrasi. Sering kali jika ada perbedaan pendapat, pertentangan, perdebatan, persaingan untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai itu justru diselesaikan melalui proses dialog sampai pada suatu konsensus maupun diselesaikan dalam bentuk kesepakatan, melalui kesepakatan politik yang merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai. Karena itu, keputusan politik merupakan upaya menyelesaikan konflik politik.

Dari segi metodologi, kelima pandangan di atas acap kali dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yakni tradisional dan *behaviour*. Ilmu politik tradisional memandang gejala politik dari segi normatif (*out to be* atau yang seharusnya) dan yang menganggap tugas ilmu politik untuk memahami dan memberikan gejala politik, bukannya menjelaskan apalagi memikirkan apa yang akan terjadi. Ilmu politik tradisional melihat politik sebagai perwujudan tujuan masyarakat-negara. Termasuk ilmu politik tradisional ini adalah yang berupa/termasuk dalam pandangan klasik dan kelembagaan.

Behavioralisme, memandang politik dari segi apa adanya (*what it is*) yang menjelaskan mengapa gejala tertentu terjadi seperti ini, dan kalau mungkin memperkirakan gejala politik yang akan terjadi. Behavioralisme melihat politik sebagai kegiatan (perilaku) yang berawal dengan asumsi terdapat kesenjangan atau perilaku manusia. Karena itu sebagai perilaku dapat dijelaskan dan diperkirakan termasuk behavioralisme dalam kegiatan dengan pandangan di atas adalah berupa kekuasaan, fungsionalisme, dan kekuasaan serta konflik.

Apakah Ilmu Politik Sebagai Ilmu?

Adapun yang dimaksudkan dengan persoalan kedudukan ilmu politik adalah terkait dengan persoalan apakah ilmu politik dapat dijadikan dengan ilmu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka terkait dengan kata 'ilmu' di depan kata 'politik' dan pada dasarnya semua ilmu sudah memiliki arti dan definisi seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, sosiologi, komunikasi, ilmu administrasi (Isjawara, 1976).

Untuk mengategorikan apakah ilmu politik sebagai ilmu atau tidak maka perlu untuk dicek apakah ilmu politik sudah memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan. Jika demikian halnya maka perlu untuk membuka kembali pembahasan apa yang dimaksud dengan ilmu yang sudah dibahas pada bagian lain di tulisan ini. Sekadar untuk mengingatkan bahwa untuk menguji apakah ilmu politik dapat dikategorikan apa ilmu atau bukan yakni dengan (Gie, 1984):

1. Apakah ilmu politik sesuai dengan batasan ilmu pada umumnya?
2. Apakah ilmu politik memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagaimana diisyaratkan bagi suatu ilmu?
3. Apakah ilmu politik mempunyai kegunaan sebagai ilmu untuk sesuatu keperluan terutama menyumbang kemajuan daripada pengetahuan manusia?